

PENGARUH SISTEM PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN KOTA PAREPARE

The Influence of the Budgeting System on the City of Parepare's Financial Independence

Arham¹, Andi Fitriani², Agung Sutrisno³

Email : arham83@rockrtmail.com¹, andifitri980@gmail.com², agungsutrisno777@gmail.com³

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan
Kode Pos 91131

Abstrak

Fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia adalah relatif kecilnya peranan (kontribusi) Pendapatan Asli Daerah (PAD) didalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain, peranan/kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk sumbangan dan bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, mendominasi susunan APBD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem penganggaran terhadap kemandirian finansial Kota Parepare. Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan kajian ilmiah di bidang akuntansi dan sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait dalam hal ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, angket dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data berupa angka-angka dan data kualitatif berupa narasi. Sumber data penelitian ini adalah orang, kertas dan tempat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data regresi linier sederhana yaitu alat statistik yang dapat digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan kota Parepare dalam enam tahun terakhir nilainya masih di bawah 20% atau dalam kategori kurang baik. Sistem penganggaran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan kota parepare dari tahun 2013 sampai 2018.

Kata kunci: Kemandirian finansial, sistem penyusunan anggaran

Abstract

A common phenomenon faced by most local governments in Indonesia is the relatively small role (contribution) of Regional Original Revenue in the structure of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). In other words, the role/contribution of revenue originating from the central government in the form of donations and assistance, for tax and non-tax revenue sharing, dominates the composition of the APBD. This study aims to determine the effect of the budgeting system on the financial independence of the City of Parepare. This research can provide benefits as material for scientific studies in the field of accounting and as input for related parties in this regard. Data collection techniques used are observation, questionnaires, and documentation. The type of data used in this study is quantitative data, namely data in the form of numbers and qualitative data in the form of narratives. The data sources of this research are people, paper, and place. The data analysis technique used in this study is a simple linear regression data analysis technique, which is a statistical tool that can be used to measure the effect of the independent variable on the dependent variable. The results showed that the level of financial independence of the city of Parepare in the last six years was still below 20% or in the poor category. The budgeting system has a significant effect on the level of financial independence of the city of Parepare from 2013 to 2018.

Keywords: Budgeting System, Financial Independence

PENDAHULUAN

Penyusunan anggaran merupakan suatu proses yang berbeda antara sector swasta dengan sektor pemerintah, termasuk diantaranya pemerintah daerah. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor pemerintahan atau publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik dan didiskusikan dengan tujuan untuk mendapatkan masukan (Mediaty dan Syarifudin, 2010).

Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik (Mardiasmo, 2005). Penganggaran sektor publik terkait dalam proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Tahap penganggaran menjadi sangat penting, karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun (Mediaty dan Syarifudin, 2010).

Proses penganggaran daerah diatur dalam Kepmendagri Nomor 13 tahun 2006. Proses penganggaran daerah dengan pendekatan kinerja dalam Kepmendagri memuat pedoman penyusunan rancangan APBD yang dilaksanakan oleh Tim Anggaran Eksekutif bersama-sama Unit Organisasi Perangkat Daerah (unit kerja) (Wulandari, 2011). Menurut Sardjito (2007) rancangan anggaran unit kerja dimuat dalam suatu dokumen yang disebut dengan Rancangan Anggaran Satuan Kerja (RASK). RASK ini menggambarkan kerangka logis hubungan antara kebijakan anggaran (arah dan kebijakan umum APBD serta strategi dan prioritas APBD) dengan operasional anggaran (program dan kegiatan anggaran) di setiap unit pelaksana anggaran daerah sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan unit kerja yang bersangkutan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

RASK memuat juga standar analisa belanja, tolak ukur kinerja dan standar biaya sebagai instrumen pokok dalam anggaran kinerja. RASK merupakan dokumen pengganti dokumen daftar usulan kegiatan dan daftar usulan proyek yang selama ini digunakan dalam penyusunan rancangan APBD dengan sistem lama.

Wulandari (2011) berpendapat bahwa untuk dapat menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) diperlukan pegawai yang mempunyai kemampuan analisis kinerja program. Tentu saja hal ini merupakan tanggung jawab yang besar bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran untuk menyediakan sumber daya manusia yang memadai, agar dapat mengelola anggaran secara ekonomis, efisien, efektif dan yang benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat.

Mengelola anggaran secara ekonomis, efisien dan efektif adalah dengan cara membagi waktu secara proporsional untuk satuan kerja atas dan bawahan. Memberikan waktu lebih banyak untuk satuan pelaksana, misalnya 1/3 waktu (maksimal) untuk perencanaan satuan atas dan 2/3 untuk satuan pelaksana agar cukup waktu untuk melaksanakan program kerja.

Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu tujuan dari otonomi daerah. Adanya otonomi daerah diharapkan masing-masing daerah dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah (Bratakusumah dan Solihin, 2001).

Fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia adalah relatif kecilnya peranan (kontribusi) Pendapatan Asli Daerah (PAD) didalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain, peranan/kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk sumbangan dan bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, mendominasi susunan APBD (Tambunan, 2002).

Otonomi daerah diharapkan masing-masing daerah dapat mencapai suatu kemandirian keuangan daerah guna lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2007). Sebaliknya dengan sistem otonomi yang nyata dan luas berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, dengan rendahnya PAD maka daerah dihadapkan pada permasalahan yang rumit.

Di samping harus meningkatkan penerimaan, daerah juga harus memacu produktivitas pemerintah daerah dengan membangun sarana dan prasarana penunjang bagi tumbuh dan berkembangnya investasi yang merupakan penggerak dalam proses pembangunan ekonomi di suatu daerah.

Otonomi fiskal daerah merupakan salah satu aspek penting dari otonomi daerah secara keseluruhan, karena pengertian otonomi fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak, retribusi dan lain-lain. Namun harus diakui bahwa derajat otonomi fiskal daerah di Indonesia masih rendah, artinya daerah belum mampu membiayai pengeluaran rutinnya. Karena itu otonomi daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai keuangan yang efektif. Pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD (Halim, 2001).

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain seperti bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Selain PAD, kemandirian keuangan daerah juga disebabkan oleh banyak faktor diantaranya dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

PAD selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat, pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD kepada APBD maka akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Kaitan antara penganggaran dengan kemandirian keuangan yaitu dalam proses penyusunan anggaran akan ditentukan segala hal yang berkaitan dengan pengeluaran dan pendapatan Kota Parepare dalam satu periode kesepannya. Kemandirian keuangan dapat terwujud diawali dengan penyusunan anggaran yang menempatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang kontribusinya paling besar diantara sumber pendapatan daerah yang lain.

Hasil observasi pada Badan Keuangan Daerah kota Parepare diketahui bahwa pendapatan daerah kota Parepare terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan atau dana bantuan dari pemerintah pusat dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kemandirian keuangan terwujud apabila pemerintah kota Parepare menjadikan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan yang kontribusinya paling besar dan tidak bergantung pada dana perimbangan.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Jenis data yang diolah adalah data kualitatif dan data kuantitatif, sumber data terdapat person, paper dan place. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik analisis data regresi linier sederhana. Sugiyono (2011), mengatakan bahwa regresi linear sederhana adalah alat statistik yang dapat digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Correlations

		Kemandirian Keuangan Daerah	Sistem Penyusunan Anggaran
Pearson Correlation	Kemandirian	1.000	.838
	Keuangan Daerah		
	Sistem Penyusunan	.838	1.000
	Anggaran		
Sig. (1-tailed)	Kemandirian	.	.000
	Keuangan Daerah		
	Sistem Penyusunan	.000	.
	Anggaran		
N	Kemandirian	30	30
	Keuangan Daerah		
	Sistem Penyusunan	30	30
	Anggaran		

Kemandirian keuangan Kota Parepare yang menunjukkan kategori kurang disebabkan karena jumlah pendapatan daerah Kota Parepare sumbernya masih didominasi oleh dana perimbangan atau dana yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat. Oleh karena itu desentralisasi fiskal menunjukkan kategori yang kurang karena masih Pemerintah Kota Parepare masih ketergantungan dari dana bantuan Pemerintah Pusat dalam hal ini dana perimbangan. Hal itu terjadi disebabkan karena dari total pendapatan daerah kontribusi pendapatan asli daerah sangat kecil jika dibandingkan dengan sumber pendapatan daerah lainnya seperti dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah Kota Parepare mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun disisi lain rasio desentralisasi fiskal Kota Parepare dalam lima tahun terakhir masih berada pada kategori kurang. Hal tersebut dapat dianalisis bahwa Pemerintah Kota Parepare masih sangat bergantung pada sumber pendapatan dari bantuan pemerintah pusat yaitu dana perimbangan yang jumlahnya paling besar dalam kontribusinya terhadap pendapatan daerah Kota Parepare.

Korelasi antara variabel sistem penyusunan anggaran (X) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (Y) diperoleh nilai sebesar $r = 0.838$. nilai ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara variabel sistem penyusunan anggaran terhadap variabel tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Parepare.

Dalam menentukan besaran kontribusi variabel sistem penyusunan anggaran (X) terhadap variabel tingkat kemandirian keuangan daerah (Y) maka digunakan rumus koefisien determinasi ($KD = r^2 \times 100\%$) dengan hasil sebagai berikut $0,838^2 \times 100 = 70\%$. Artinya bahwa variabel sistem penyusunan anggaran hanya memberikan kontribusi sebesar 70% terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Parepare.

Berdasarkan tabel *model summary* diperoleh nilai $F_{hitung} = 66.060$ sedangkan menggunakan tabel distribusi F diperoleh nilai $F_{tabel} = 4.20$ yang berarti $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem penyusunan anggaran terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Parepare.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah kota Parepare dalam enam tahun terakhir nilainya masih dibawah 20% atau berada pada kategori kurang. Sistem penyusunan anggaran berpengaruh

signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan kota Parepare tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan maka peneliti memberikan saran agar Pemerintah kota Parepare dapat meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerahnya dengan cara menggali potensi-potensi pendapatan asli daerah antara lain potensi pajak penerangan jalan karena melihat banyaknya lampu penerangan jalan di Kota Parepare serta pajak hiburan karena intensitas kegiatan-kegiatan hiburan yang ada di Kota Parepare sehingga kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2010. *"Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar"*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Bratakusumah, Solihin, S. Deddy, Dadang. 2001. *"Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah"*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2012. *"Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi"*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Hindriks and Myles. 2004. *"Intermediate Public Economics"*. London: The MIT Press.
- Ismail dan Idris. 2009. *"Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dan BLU"*. Indeks. Jakarta
- Mardiasmo. 2009. *"Akuntansi Sektor Publik"*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2016. *"Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah"*. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mediaty dan Syarifuddin. 2010. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Dengan Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Sebagai Moderator (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Barru Sul-Sel)*. Jurnal Ekonomi. Sulawesi Selatan.
- M. Nafarin. 2013. *"Penganggaran"* Edisi Ketiga, Cetakan Kedua. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *"Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D"*, AFABETA. Bandung.
- Tambunan, Tulus T.H. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia, Beberapa Isu Penting*. Salemba Empat. Jakarta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S, 2007, *Manajemen Publik*, Penerbit PT. Grasindo. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2003.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.